**Tafsir-tafsir Baru**

Kejadiannya kerap berlangsung seperti ini: puluhan pengemudi mobil dan motor menghentikan kendaraannya saat lampu merah menyala, menunggu, dan membunyikan klakson saat lampu hijau menyala—bukan segera menjalankan lagi kendaraannya atau sekadar menunggu ‘yang di depan’. Maka, kita mendapati suasana riuh selama beberapa detik, sebelum melanjutkan perjalanan yang mungkin telah tak senyaman permulaannya.

Kejadian yang cukup serupa kerap berlangsung seperti ini: pengendara motor memakai pelindung kepala untuk menyelamatkan diri dari ‘sergapan’ polisi, bukan benar-benar untuk menjaga kepalanya, atau menaati peraturan lalu lintas. Maka, kita pun kerap dihadapkan pada pertanyaan “emang ada polisi di sana?” ketika mengharapkan pengendara motor lain untuk memakai pelindung kepala, seolah jalan raya tak pernah menyimpan potensi kecelakaan dan cuma menyimpan polisi dengan surat tilangnya.

Begitulah, selain menjadi persoalan pada konteksnya—lalu lintas—, kedua kejadian itu juga menjadi persoalan pada konteks penafsiran tanda dewasa ini. Perhatikanlah bagaimana lampu hijau yang menyala tak lagi ditafsirkan sebagai ‘silakan jalan’, tetapi ‘bunyikan klakson!’. Perhatikan juga pelindung kepala yang tak lagi bergerak di pikiran beberapa pengendara motor sebagai benda yang mampu melindungi kepala dari benturan, tetapi lebih sebagai benda yang menolak tilangan. Sehingga, keselamatan berkendara tak lagi menjadi hasil penting dari proses interpretasi tanda berupa pelindung kepala.

Mungkin ada kejadian lain yang serupa dengan keduanya, yang pernah anda dapati. Tetapi, tulisan ini berusaha mengajukan jawaban ihwal penyebab bergesernya tafsir dari kedua tanda yang sudah dibicarakan, meski tanpa maksud menjadikan itu sebagai gejala kolektif keseluruhan tanda yang ada pada kehidupan ini. Kiranya, karena penafsiran tanda berkait erat dengan lingkungan tempat tanda itu ada, menjadi menarik ketika kita bertolak dari gejala sosial yang mempengaruhi gelagat berkendara orang-orang kita—untuk menyebut masyarakat Serang, Tangerang, dan sekitarnya sebagai masyarakat desa-kota.

**Hidup yang Memburu dan Surat Tilang**

Dewasa ini, ketika materi menempati posisi terpenting di hati kebanyakan orang, satu hari seolah tidak dibangun dari dua puluh empat jam. Kegiatan semacam sarapan, berangkat kerja, bekerja, makan siang, belanja, makan malam, tidur, dan lain-lain tak lagi menjadi tujuan bermakna dari kehendak manusia, melainkan rutinitas yang telah baku dan setiap agenda diburu oleh agenda yang lain. Tak berasa. Kita terjebak di dalam rutinitas itu sebagai objek materil, sebagai benda.

Maka, kita menjadi lebih bergantung pada benda-benda lain semacam uang, kendaraan, *gadget*, dan piranti lain dalam rangka mempertahankan diri. Masing-masing kita bekerja untuk membentuk persekutuan benda, yang sayangnya setiap persekutuan benda kita kerap bergesekkan dan ingin lebih maju tinimbang yang lain: Budi, mobil, ponsel, dompet dan isi dompet Budi, kerap ingin mengalahkan Santi, motor, ponsel, dompet dan isi dompet Santi—baik secara kuantitas, kualitas, maupun gengsi. Santi pun bekerja lebih giat, termasuk tak menyediakan waktu untuk bersabar di jalan raya.

Dorongan untuk menang dari yang lain membawa kita pada sikap apatis, tak peduli peraturan yang berpotensi menghambat kepentingan kita, atau dengan kalimat lain: mengabaikan keselamatan kita sendiri, baik dari segi esensi (bernilai, bertuhan, dan bersosial) maupun dari segi struktur (bernyawa dan bertubuh). Kita tak lagi sesuai dengan *homo homini lupus* karena telah juga menjadi serigala untuk diri kita sendiri. Kita abaikan diri kita sebagai mahluk sosial dengan memburu-buru orang lain di jalan raya dengan klakson, yang notabene bisa mengintimidasi dan membahayakan. Kita abaikan diri kita sendiri sebagai makhluk yang dibidik kematian dengan tak memakai pelindung kepala atau sabuk pengaman, serta berkendara dengan baik.

Ihwal surat tilang adalah perbenturan yang lain lagi: ia mempertemukan kepentingan hukum, pengendara, dan polisi. Surat tilang sebagai tanda mempunyai kekuatan untuk membawa seorang pengendara pelanggar peraturan ke pengadilan atau membawa uangnya ke kantong oknum polisi. Supremasi hukum berada di antara kesadaran pengendara dan ketaatan para polisi. Menilik hal-hal yang sudah dibicarakan, onum polisi bisa menjadi serupa dengan para pengendara yang apatis, ia terjebak pula dalam ketergantungan terhadap benda-benda yang hanya bisa dimiliki dengan uang. Karena itu, oknum polisi itu bisa saja mengabaikan alur persidangan untuk pelanggar peraturan dengan kata ‘damai’ yang juga telah bergeser tafsirnya.

**Pilihan-pilihan**

Akhirnya, pikiran para pengendara dibentuk oleh keadaan semacam itu hingga memunculkan tafsir baru terhadap tanda-tanda yang telah dibicarakan. Tafsir atas lampu hijau yang menyala adalah “bunyikan klakson!”. Ia berasal dari ketergesaan para pengendara, ketegangan yang dibentuk jadwal kerja dan semacamnya, juga sikap egois dan tak sabar untuk memenangi pertarungan pemenuhan kebutuhan dan gengsi. Begitu pun ihwal pelindung kepala yang ditafsirkan sebagai penolak surat tilang. Tafsir itu berasal dari hilangnya kepedulian terhadap diri sendiri, juga dominannya unsur hukuman dan penyelewengan kewajiban yang dilakukan oknum polisi, sehingga tafsir awal atas pelindung kepala menjadi kabur. Lingkungan membentuk interpretasi kita.

Ada dua pilihan yang tersedia: kita membiarkan gejala-gejala itu atau dengan kata lain terlibat dalam konvensi baru mengenai tafsir tanda-tanda itu, atau menahan diri dari dorongan-dorongan kontraproduktif semacam yang telah disebutkan. Pilihan pertama tentu akan memperpanjang masa-masa kering kehidupan sosial kita secara kolektif: semua berjalan sendiri-sendiri dengan kemauan masing-masing, sambil menghadapi gesekkan-gesekkan. Pilihan kedua akan membangun lagi ketentraman kita sebuah masyarakat, sambil menikmati pemahaman yang baik terhadap tanda-tanda sebagai hasilnya, serta secara tidak langsung membangun martabat sebagai subjek.

Tetapi, ihwal pergeseran tafsir dari tanda berupa lampu hijau yang menyala atau pelindung kepala adalah persoalan-persoalan sederhana dan relatif. Bahkan terkesan remeh, meski dikaitkan dengan keadaan aktual lingkungan kita sekarang ini. Masih ada persoalan lain terkait tanda dan tafsirnya, serta mungkin lebih rumit dan penting. Misal, tanda berupa foto-foto pejabat yang tersebar di jalan-jalan (*icon*), apakah merujuk pada seseorang yang layak dan patut menjadi pemimpin, seorang negarawan yang amanah, atau justru tidak merujuk pada apa pun karena para pejabat memang tak ada—cuma mitos yang dibangun poster-poster?**[\*]**

**Estetika dalam Kungkungan**

Kalau kita melihat rumah-rumah adat di Indonesia, kita sedang melihat sebuah produk kebudayaan yang mempunyai kaitan erat dengan teks-teks di luar dirinya, yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi dirinya. Seperti hampir semua produk kebudayaan yang lain, ia dibentuk oleh banyak hal: keadaan geografis, psikologi masyarakatnya, hubungan sosial, nilai dan kepercayaan yang dianut, dan lain-lain. Ketika itu, kita pun seolah menyaksikan kumpulan potongan realitas yang menjadi sebuah teks baru dalam konteks lain yang meminta untuk direspons.

Di daerah Sumatera, kita bisa melihat rumah-rumah adat dengan ciri utama, yaitu bentuknya—rumah panggung. Selain untuk menghindari penghuninya dari binatang-binatang buas, beberapa di antaranya menggunakan kolong panggungnya untuk menyimpan persediaan makan, kandang ternak, dan barang-barang (beberapa yang lain lebih menggunakan bangunan seperti *rangkiang* di Sumatera Barat untuk hal itu). Semuanya memberi kita gambaran mengenai keadaan geografis Sumatera yang berhutan dan kebiasaan swadaya ihwal pemenuhan kebutuhan.

Selain itu, nilai dan kepercayaan masyarakat Sumatera juga menjadi bagian dalam bentuk dan corak rumah-rumah adat. Masih menjadikan rumah-rumah adat Sumatera sebagai contoh, kita bisa melihat ukiran “*itiak pulang patang*” di rumah gadang sebagai simbol pola hidup orang-orang Minangkabau dan warna merah, putih, dan hitam di rumah bolon sebagai representasi nilai yang dianut oleh orang-orang Batak Toba. Rumah adat tidak dibangun dengan kosong nilai, ia menjadi *mikro kosmos* yang berhubungan langsung dengan *makro kosmos*. Sebuah relasi yang mengakar, sekaligus menembus batas-batas jiwa pemiliknya dari generasi ke generasi.

Terdapat sesuatu yang menarik lainnya, yang lebih umum dari rumah-rumah adat di Indonesia dan inilah yang ingin penulis bahas, yaitu tidak terdapatnya pagar yang jelas. Setiap rumah tidak membatasi dirinya dengan rumah yang lain, seolah membuka diri kepada apapun. Setiap orang, entah pemilik atau tetangga, bisa melihat sebuah rumah adat secara menyeluruh dan mendalami bentuk, corak, dan representasi kebudayaan lainnya. Sampai di sini rumah adat tidak hanya menjadi tempat tinggal, lebih dari itu ia menjadi sebuah karya seni yang dibentuk dan membentuk hubungan masyarakat yang terbuka, menjunjung nilai, dan sikap tolong-menolong yang baik.

Dari Banten sendiri, kita tidak akan menemukan sesuatu yang jauh berbeda. Orang-orang Kanekes memilliki rumah adat yang berpanggung, beratap, berlantai belahan-belahan bambu, dan berdinding gedek, serta berpenyangga batu. Tanpa pagar, rumah-rumah milik orang-orang Kanekes mewujud dari keselarasan hidup dengan alam tempat mereka hidup, keuletan dalam mengolah pemberian alam menjadi kesederhanaan tempat tinggal mereka tanpa meninggalkan unsur estetik, dan sikap yang tidak defensif terhadap sesama. Dari daerah-daerah lain di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, bahkan Irian Jaya kita bisa menemukan sesuatu yang serupa.

Dengan kalimat yang lain, secara adat dan turun-temurun, kita telah diupayakan menjadi sebuah bangsa yang memiliki kedalaman nilai estetik dan moral. Kita diajarkan untuk masuk ke dalam diri guna mengkhidmati eksistensi sebagai manusia di satu sisi, sekaligus keluar guna bercengkrama dengan alam dan manusia, serta berhubungan langsung dengan ‘Yang Agung’ di sisi yang lain. Kita, sebagai bangsa, tidak diarahkan untuk menutup diri dengan membangun (secara literer) pembatas antara kita dan lingkungan.

**Sebuah Kungkungan**

Tapi, jauh setelah rumah-rumah adat hanya meninggalkan catatan sebagai rumah adat masing-masing daerah, urusan demografi yang sulit diatasi, terkikisnya alam kita, sekaligus pendidikan mengenai nilai-nilai luhur yang melemah, serta beralihnya orientasi estetik arsitektur kita, kebanyakan rumah-rumah yang bisa kita lihat sekarang adalah proyeksi dari wacana kewas-wasan, kepadatan penduduk, dan kemewahan dengan wajah individualistik di layar kenyataan kita hari ini. Kita kehilangan ‘keadatan’ dari rumah-rumah yang kita huni atau sekadar kita lihat.

Perlulah kita menjadikan rumah-rumah di perumahan-perumahan‘elite’ yang terletak di sekitaran Serpong dan Karawaci sebagai contoh. Selain ‘rasa barat’ yang begitu kuat—yang membuat kita lebih seperti berada di Beverly Hills ketimbang di Tangerang—rumah-rumah tersebut berada di lingkungan yang memberi kesan ekslusif dengan garis-garis areal yang jelas dan pos-pos penjagaan. Satu hal yang masih bisa dianggap positif, meski hal-hal sebelumnya pun bisa saja dianggap positif, adalah masing-masing rumah masih berkenan untuk dinikmati sebagai karya seni karena pagar tidak dibangun dengan ketinggian yang berlebih.

Sesuatu yang menggelitik penulis justru berasal dari rumah-rumah di perumahan yang berkesan biasa-biasa saja. Rumah-rumah tersebut seolah membaur dengan rumah-rumah yang lain, sekaligus membentengi diri dengan pagar-pagar yang tinggi dan tertutup. Kalau bertemu dengan pemiliknya adalah sebuah kesulitan, menikmati corak dan warnanya saja pun merupakan kesulitan. Sangat mungkin rumah-rumah tersebut memiliki ukiran yang menarik, perpaduan warna dan hiasan yang indah, atau yang semacamnya, tetapi keindahan itu tertutup dan menjadi keindahan yang terkungkung. Selain pemilik rumah dan tamu yang diperkenankan, tidak ada yang bisa menikmatinya sebagai karya seni.

Tetapi, berdirinya pagar-pagar yang tinggi dan menutup keindahan sebuah rumah dari sekitarnya bukan sekadar menyembunyikan hal-hal menarik dari rumah itu. Ini berkaitan dengan, seperti halnya rumah adat, dengan hal-hal di luar dirinya. Salah satu yang paling kuat adalah keamanan. Tingginya angka pencurian dan kriminalitas lainnya menyebabkan sebuah ketakutan yang menggerakkan para pemilik rumah untuk memproteksi dirinya dan barang-barang yang mereka miliki dengan pagar dan sistim keamanan lainnya.

Sayangnya, secara langsung maupun tidak, kekhawatiran terhadap realitas keamanan kita sebagai sebuah bangsa berdampak pula pada pola pergaulan kita. Setelah semua rumah berdiri dengan pembatas-pembatas yang jelas, kita tidak hanya menutup arsitektur rumah sebagai sesuatu yang estetik, keselamatan keluarga dan barang-barang kita dari dunia luar yang mengancam, tetapi juga memagari diri kita dari lingkungan sekitar. Hampir sama sekali berbeda dengan rumah-rumah adat kita, rumah-rumah kita tidak membagi dan dibagi keindahan, nilai-nilai luhur, sekaligus identitas yang secara metaforis nampak dari rumah-rumah dan interaksi sosial secara langsung.

Bagaimana pun, rumah adalah sebuah bangunan dan manusia adalah pembuat dan pemiliknya yang mencoba berkomunikasi lewat bangunan itu. Kalau pagar sebagai bagian dari rumah itu terlampau sulit untuk ditiadakan, setidaknya ‘pagar-pagar’ antar sesama kita tidak lagi didirikan, sehingga kita masih mempunyai kemungkinan untuk saling berhubungan sebagai bangsa: satu hal estetik yang agung. **[\*]**

**Dialog ‘Tokoh Ketiga’**

Selasa dan Rabu, 11-12 Maret 2014, Teater Kafe Ide Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berturut-turut mementaskan naskah dari Arifin C. Noer, “Pada Suatu Hari” (PSH), dan “Sayang Ada Orang Lain” (SAOL) dari Utuy Tatang Sontani. Secara keseluruhan, dua pementasan yang disutradarai oleh Saduri Dagul dan Syamsudin itu hampir sampai pada realisme yang juga ingin dicapai oleh para penulis naskahnya.

Tapi, penulis tidak ingin berbicara mengenai aktor dan artistik sebagai ‘tokoh pertama’ dan ‘tokoh kedua’ dalam keseluruhan dramaturgi pementasan-pementasan tersebut. Penulis ingin berbicara mengenai ‘tokoh ketiga’: para penonton. Terlepas dari respons para penonton terhadap emosi yang dihadirkan dari atas panggung, para penonton sebagai ‘tokoh ketiga’ telah mengambil bagian lebih dari jatah mereka. Hal tersebut, kemudian, menjadi persoalan yang tidak lagi berakar di dunia *idea* saat menyimak pementasan. Lebih sederhana dari itu, hal tersebut adalah persoalan kesadaran saat menyimak pementasan, terlebih yang realis seperti dalam konteks ini.

Tanpa melupakan persoalan lain semacam masih banyaknya ponsel yang menyala dan dioperasikan selama pementasan-pementasan itu berlangsung, yang sinarnya sangat mengganggu, penulis ingin menjabarkan duduk perkaranya. Jadi, begini: 1. para penonton tertawa untuk hal-hal yang tidak lucu; 2. penonton mengomentari akting dan kejadian-kejadian yang ditampilkan di atas panggung; 3. penonton berdiskusi mengenai pementasan yang masih berlangsung; 4. penonton menimpali dialog satu tokoh yang jelas-jelas diarahkan hanya ke tokoh lain dalam cerita; dan 5. penonton ribut saat menyaksikan beberapa adegan mesra.

Sampai di sini, barangkali semua tampak wajar, tapi penulis ingin pula menjelaskan perkaranya. Ihwal para penonton yang tertawa bukanlah karena humor dan semacamnya, melainkan hanya karena melihat seseorang yang mereka kenali menjadi tokoh-tokoh dalam pementasan-pementasan tersebut. Tokoh-tokoh yang mereka kenali ‘subjek aslinya’ pun tidak selama pementasan menyajikan humor atau sekadar guyon, tokoh-tokoh tersebut hanya orang-orang lanjut usia seperti Tuan dan Nyonya Onda dalam PSH. Apa yang lucu, dalam realita panggung pementasan PSH, dari menjadi tua? Para penonton tidak melulu tertawa untuk merespons *guyon* yang memang terdapat di dalamnya, mereka menertawakan kenalan-kenalan mereka yang tampak berbeda di atas panggung.

Perkara kedua, penonton berkata “*kok gitu sih jalannya?*” untuk mengomentari cara jalan Nyonya Onda dalam PSH, “*masak nelpon langsung nyambung!*” untuk mengomentari kesalahan logika akting pemeran Novia saat menghubungi suaminya dalam PSH, *“ih tasnya ketinggalan*” untuk mengomentari adegan pamitnya Suminta kepada Sumini dalam SAOL, dan semacamnya sebelum pementasan selesai dan dengan suara yang terdengar. Kita tentu bisa menghargai koreksian tersebut jika pementasan-pementasan itu telah selesai, tapi yang terjadi menunjukkan bahwa penonton telah menjadi ‘Si Jago yang Menganggu’.

Perkara selanjutnya serupa dengan perkara kedua, tapi jauh lebih mengganggu. Kalau perkara kedua hanya diisi oleh *celetukan-celetukan* yang mengganggu dalam satu sampai lima detik, perkara ketiga mengganggu sampai satu menit lewat dan bisa saja membuat beberapa dialog di atas panggung tidak lagi terdengar. Alih-alih menjadi penonton yang cerdas, diskusi mengenai pementasan yang sedang berlangsung sama sekali menunjukkan kepandiran. Diskusi itu pun kelak membuat beberapa bagian dari pementasan tidak tercatat dalam apresiasi penonton sendiri.

Perkara keempat secara spesifik adalah penonton yang berkata “*betul*” saat Suminta berkata “*coba kau pikir, gaji buruh sekarang sudah tidak seimbang dengan harga kebutuhan sehari-hari*” dan terus berkata ‘betul’, bahkan dengan intonasi yang lebih kencang, setiap kali Suminta menyoal gaji buruh itu. Baiklah, ini bisa saja dianggap sebagai respons penonton saat kadarnya tepat, tapi ‘Tuan Marxis’ kita telah melampaui batas dan mengganggu. Barangkali, kelak, ia bisa menahan sejenak refleksinya atas pengalaman menyimak pementasan teater sampai ia memang terlibat demonstrasi dan berada di jalan, bukan di gedung pertunjukkan.

Perkara terakhir sangat kekanak-kanakan. Dalam PSH, terdapat adegan Niko memeluk adiknya, Novia. Niko memeluk Novia untuk menenangkan Novia yang sedang merencanakan perceraian dengan suaminya. Pada saat menyaksikan adegan itu, penonton ribut. Entah apa jelasnya yang diributkan, tapi ucapan penonton semacam ‘*lumayan*’ menunjukkan bahwa penonton tidak memahami jalan cerita pementasan.

Penonton tidak melihat dua tokoh berpelukan, yang dalam pementasan itu satunya bersedih dan yang lain menenangkan, tapi lebih melihat dua kenalan mereka berpelukan. Cerita menjadi tidak menarik saat keributan itu berlangsung. Lebih ribut lagi saat adegan serupa dalam SAOL, ketika Suminta memeluk dan mengecup kening Sumini, istrinya. Penonton ribut sembari menoleh dan menunjuk-nunjuk salah satu dari mereka yang mungkin adalah kekasih pemeran Sumini atau Suminta, dalam dunia nyata. Ihwal ini, hampir sama dengan perkara pertama.

Begitulah perkaranya. Penonton di dunia yang terpisah dari panggung pementasan-pementasan realis itu telah mengambil bagian. Sayangnya, tidak semua pengambilan bagian itu menjadi sekadar respons yang wajar, melainkan lebih sebagai bentuk gangguan. Saat ini, penulis mengatakan bahwa semua perkara tersebut tidak berasal dari keseluruhan penonton. Beberapa penonton terlibat, beberapa yang lain tidak. Maka, gangguan yang diberikan oleh penonton-penonton yang terlibat dengan perkara-perkara tersebut adalah gangguan yang tidak saja berarah ke pementasan yang sedang berlangsung, tapi juga penonton lain yang ‘duduk manis’ dan beradab.

Sangat mungkin banyak penonton yang ingin menyimak keseluruhan pementasan-pementasan itu, tapi sayang bagian-bagian yang diganggu oleh dialog ‘tokoh ketiga’ yang telah disebutkan membuat bagian-bagian itu telah lepas dari penyimakan. Hal itu mampu menyebabkan tidak sempurnanya apresiasi penonton setelah pementasan-pementasan itu selesai, termasuk apresiasi penulis yang nampak di awal tulisan ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini membuktikan bahwa penulis tidak sempurna menyimak pementasan-pementasan oleh Teater Kafe Ide tersebut, tapi siapa pun akan terganggu jika tidak semua penonton taat dengan etika menyimak pementasan. Kita boleh sama-sama mempertimbangkan ketaatan dengan etika tersebut dan berharap ada pementasan lain yang bisa sama-sama kita simak dengan sempurna. Jika begitu, geliat dunia teater Banten bisa lebih terasa. **[\*]**

**Lahan Parkir dan Tubuh-tubuh yang Dimacetkan**

Begini kondisinya: setelah pasar kendaraan bermotor kian bergairah, bahkan cenderung semakin liar dengan menyebarnya *dealer* ke kampung-kampung dan segala bentuk kemudahan transaksi yang ditawarkan, kita tidak bisa tidak melihat jalan-jalan dipenuhi motor dan mobil-mobil. Kemacetan di mana-mana. Kewarasan kita terus-menerus diuji lewat rutinitas berangkat dan pulang kerja, berangkat dan pulang kuliah, atau apapun yang mengharuskan kita berada di jalan-jalan. Kondisi pasar kendaraan bermotor yang barangkali baik untuk perekonomian daerah, pada tahap selanjutnya, mengancam kita (sebagai subjek) dengan risiko-risiko yang terbentuk dari ketegangan di jalan-jalan.

Kondisi yang lebih gentingnya begini: infrastruktur dan perangkat kebijakan yang tersedia seolah tidak berbanding lurus dengan meningkatnya angka pemakaian kendaraan bermotor kita. Maka, selain kemacetan, kita juga akan dihadapkan dengan lahan parkir yang penuh, ketegangan lain dengan pejalan kaki karena ruang-ruang mereka yang terpaksa dipakai untuk parkir, dan semacamnya. Inilah—lahan parkir—yang akan kita bahas lebih lanjut, berangkat dari dua kejadian pada beberapa tahun lalu dan satu kejadian aktual, yaitu bentrokan di Pamulang antara Barisan Muda Betawi dan Kembang Latar pada 2009, kasus tertabraknya siswa TK Boddhicita di Medan oleh mobil yang dikendarai gurunya sendiri pada 2012, dan serangkaian demonstrasi mahasiswa Untirta belakangan ini.

Untuk kasus yang pertama, ini kerap terjadi dan tidak menjadi fenomena yang asing: perebutan lahan parkir. Urusan lahan parkir menjadi latar belakang bentrokan antara dua organisasi masyarakat seolah lahan parkir sejajar dengan urusan SARA dan ideologi (kalau memang ideologis)—dua hal yang kerap juga menyebabkan bentrokan, termasuk dua organisasi masyarakat yang telah disebutkan di atas. Kalau boleh menyimpulkan secara serampangan, lahan parkir telah menjadi sebuah ruang yang kemudian menghasilkan ‘laba’ karena secara langsung telah berhubungan dengan banyaknya pengguna kendaraan bermotor sebagai pasar, sehingga menarik untuk dijadikan sumber penghasilan. Patut dan layak diperjuangkan hak kepengurusannya.

Setiap organisasi masyarakat yang terlibat dalam bentrokan semacam ini, sebagai sebuah lembaga yang secara ‘legal formal’ mungkin tidak berhak mengurus lahan parkir, entah secara apa (konsensus?) telah memiliki kawasannya masing-masing. Sebuah pembagian wilayah kepengurusan lahan parkir telah begitu saja berjalan. Dalam kasus bentrokan Barisan Muda Betawi dan Kembang Latar di Pamulang pada 2009, sama seperti bentrokan-bentrokan semacamnya, berawal dari satu pihak yang secara sengaja maupun tidak masuk ke dalam wilayah pihak lain untuk mengurus lahan parkir yang ada. Sebuah ketegangan yang luar biasa telah terbukti berawal dari persoalan lahan parkir: banyak orang terlibat di dalamnya, banyak jiwa dibidik oleh luka dan kematian.

Kasus kedua juga berawal dari urusan lahan parkir, bahkan khusus hal ini terjadi di lahan parkir. Terlepas memang kasus itu merupakan kelalaian manusia, kasus itu juga merupakan hasil dari gagalnya pengelolaan tata ruang TK Boddhicita yang didesak oleh jumlah kendaraan yang mesti diparkir: lahan yang tersedia telah dipaksa berfungsi ganda sebagai lahan parkir dan tempat berkegiatan para siswa. Dalam kasus itu, 16 siswa mengalami luka ringan dan berat, sehingga mesti dilarikan ke rumah sakit terdekat. Jika begini, sama seperti jalan raya, lahan parkir menjadi ruang yang memberi peluang bagi kecelakan-kecelakaan.

Kasus ketiga terjadi di lingkungan para intelektual, kampus Untirta. Dari serangkaian kegelisahan mahasiswa Untirta, ketaktersediaan lahan parkir yang cukup di kampus Serang menjadi salah satu yang mengisi rangkaian itu. Betapa mahasiswa Untirta yang motif kedatangannya ke kampus adalah menuntut ilmu kerap ditabrak dengan agenda mencari tempat kosong di lahan parkir, ditekan secara visual dengan menumpuknya kendaraan-kendaraan di tempat-tempat yang dekat dengan gedung-gedung perkuliahan, sampai akhirnya mengorbankan sekian lama waktu mereka untuk menuntut perubahan atas hal itu, sekaligus secara umum menuntut pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik.

Begitulah, dari persoalan lahan parkir bisa lahir persoalan-persoalan lain yang lebih krusial bagi kehidupan sosial dan akademik kita, bahkan kelangsung hidup kita itu sendiri. Tetapi, apakah lahan parkir, entah dari segi ia sebagai sumber penghasilan seperti dalam kasus pertama atau tata ruang seperti dalam kasus kedua dan ketiga, layak untuk disebut sebagai sumber segala masalah? Tulisan ini mencoba mengajukan jawaban: bukan! Sumber segala masalah terkait lahan parkir, termasuk kemacetan yang disebut di awal, adalah tubuh kita sendiri—yang kadung terikat dengan peran benda-benda, dalam hal ini kendaraan—dan hasrat yang telah memacetkannya: hasrat yang membuat kita percaya bahwa kita benar-benar harus memiliki dan menggunakan kendaraan pribadi.

**Tubuh yang Dimacetkan**

Sebagai entitas materil, tubuh kita menjadi jembatan yang menghubungkan pikiran kita (sebagai entitas imateriil) dengan dunia. Keterlibatan tubuh kita dengan dunia memungkinkan bertambah kayanya pikiran kita. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh tubuh kita, semakin luas pengetahuan kita mengenai segala sesuatu yang ada di dan pada dunia ini. Tetapi, sebuah tantangan justru datang dari dalam diri kita sendiri, yaitu keengganan untuk membawa tubuh kita bersentuhan dengan dunia. Memacetkannya di suatu pola yang jauh dari potensi empirik semacam terik matahari, rasa haus dan lelah berjalan kaki, kesadaran orang-orang kurang beruntung di pinggir-pinggir jalan: terikat pada fungsi benda-benda, salah satunya kendaraan bermotor.

Ke mana pun kita pergi, sedekat apapun jarak yang mesti kita tempuh, kita kerap langsung berpikir bahwa kita harus naik kendaraan bermotor. Kata ‘pergi’ kadung berkait erat dengan motor atau mobil pribadi kita. Keberkaitan itu pun menggugurkan kemungkinan bahwa pergi bisa saja dengan berjalan kaki. Menggagalkan upaya pemaksimalan kerja tubuh dan persentuhannya dengan dunia. Maka, ketika orientasi tersebut menjadi kolektif, kita bisa berkata, “wajarlah semua kemacetan ini.”. Setiap orang, dengan kendaraan pribadinya, saling menekan dan menyumbang sekian persen kegilaan di jalan-jalan raya, menyumbang sekian persen potensi keributan di dan dari lahan-lahan parkir.

Rasanya, kita perlu sesekali berpikir ulang mengenai pemakaian kendaraan bermotor pribadi, Upaya monumental semacam program “Hari Tanpa Kendaraan” memang sudah kerap diselenggarakan, tetapi kesadaran kolektif tidak bisa dibentuk oleh sulap. Mesti ada penyebaran wacana ihwal semua ini, yang masif dan berkesinambungan. Bagaimana pun, tubuh kita mesti bergerak sesuai dengan perannya sebagai penyambung antara dunia dan pikiran kita—laboratorium untuk mengolah realitas menjadi pengetahuan. **[\*]**

**Konteks Kini bagi Teks Lampau**

Sebuah karya sastra kerap menjadi semacam catatan bagi kondisi lingkungan saat atau sebelum ia dituliskan. Terlepas dari persoalan kondisi tersebut telah melewati ruang refleksi dan imajinasi penulisnya, yang kemudian menjadi sangat subjektif, kita bisa mempercayainya sebagai rujukan sosial-budaya lebih dari sekadar mempercayai kabar burung. Lalu, sebagai pembaca, sangat mungkin kita akan melihat realitas tidak lagi sesederhana biasanya setelah selesai membaca sebuah karya sastra.

Beberapa penyair seperti WS Rendra dan Wiji Thukul, sebagai contoh, telah menulis banyak puisi mengenai ketidakadilan, perjuangan hak rakyat, kesewenang-wenangan penguasa dan semacamnya. Mereka telah menangkap kondisi lingkungan pada tahun-tahun mereka hidup di negara ini, lalu melepaskannya lagi kepada kita dalam bentuk puisi yang sampai saat ini masih kita baca dan pelajari, bahkan dijadikan inspirasi untuk turun ke jalan-jalan oleh beberapa dari kita.

Apa yang membuat kita tetap membaca puisi-puisi mereka, sekaligus membuat aksi yang berangkat dari semua itu? Jawaban yang cukup mendekati adalah karena kita belum kehilangan konteks untuk teks-teks puisi mereka. Kita masih berhadapan langsung dengan kondisi yang juga dihadapi Rendra dan Thukul: kita masih melihat rumah-rumah besar di antara rumah-rumah kecil, mendengar pejabat-pejabat yang ditangkap karena korupsi, atau sekadar menyaksikan beberapa saudara menjadi jahat dan melacur karena keadaan yang berat itu.

Sebentar kita baca potongan puisi Rendra yang berjudul “Orang-orang Miskin”1:

“…

orang -orang miskin berbaris sepanjang sejarah

bagai udara panas yang selalu ada

bagai gerimis yang selalu membayang

orang-orang miskin mengangkat pisau-pisau

tertuju ke dada kita

atau ke dada mereka sendiri

…”

Puisi yang ditulis pada tahun 1978 di atas adalah upaya mencatat kondisi masyarakat kita pada akhir 70-an, ketika negara ini sedang menggeliat tanpa kemerataan. Satu sisi melejit, sisi lainnya tidak ke mana-mana atau justru merosot. Industri mulai diramaikan produk-produk dari luar negara, berbarengan dengan wajah lain masyarakat kita yaitu masyarakat miskin dan praktik kekuasaan yang tertutup. Di puisi itu, Rendra juga mencatat dua pilihan yang tersedia bagi masyarakat yang dihadapkan dengan kemiskinan pada saat itu: melakukan tindakan kriminal atau berhenti putus asa.

Oleh karena keadaan tidak benar-benar berubah: angka kemiskinan negara kita masih tinggi, yaitu 28,07 juta orang (meski sudah turun 0,52 juta orang dari tahun sebelumnya)2, kriminalitas masih marak di negara kita (sepanjang tahun 2013, terjadi 305.708 kasus)3, dan masih ada masyarakat yang akhirnya memutuskan bunuh diri (di Jawa Tengah dan Yogyakarta saja, telah terjadi 28 kasus bunuh diri sepanjang tahun 2013)4, puisi Rendra masih menjadi teks yang kontekstual. Puisi “Orang-orang Miskin” tidak tertolak oleh pemahaman kita sebagai pembaca yang hidup pada tahun 2014, ketika kita bisa menangkap apa-apa yang ditangkap Rendra dari kondisi saat ia menulis puisi itu dalam hidup kita saat ini.

**Banten Kini Sebagai Konteks**

Banten pernah memiliki seorang sastrawan bernama Wan Anwar. Sejak masa-masa awal ke-provinsi-an Banten, ia memberi sumbangsih penting kepada perkembangan dunia sastra. Lewat esai, cerpen, dan puisi-puisinya, Wan Anwar menyajikan kepada kita, beberapa di antaranya, sebuah refleksi dari kondisi sosial kita dan gejolak spritualnya. Selain sebagai sastrawan yang berkarya, Wan Anwar juga melibatkan dirinya dengan perkembangan pengetahuan sastra secara akademis. Di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Untirta-lah ia telah juga memberi sumbangsih besar.

Senin-Selasa, 20-21 Januari 2014 lalu, mahasiswa tingkat tiga Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Untirta menyelenggarakan Gelar Sastra. Sebagai tugas akhir semester mata kuliah Gelar Sastra yang mewajibkan mereka untuk mengadaptasi karya-karya Wan Anwar menjadi pementasan teater dan film, penyelenggaraan kegiatan tersebut layak dinilai sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar penuntasan kewajiban. Menyambung pembicaraan kita sebelumnya mengenai kondisi realitas kita yang terus membuat karya-karya sastra dari masa lampau masih kontekstual, karya-karya yang ditampilkan pada kegiatan Gelar Sastra tersebut telah mencoba menyajikan sesuatu yang menarik.

Seperti yang sudah disampaikan, ada dua jenis karya yang ditampilkan pada kegiatan Gelar Sastra: pementasan teater dan film. Dari semua pementasan teater dan film yang disajikan, siapa pun yang hadir dan menjadi penyimak bisa menangkap bahwa semua adalah upaya menyajikan sesuatu yang sama dengan media yang berbeda. Kalau Wan Anwar memberikan kepada kita dalam bentuk tulisan, para peserta telah menyajikan kondisi sosial dalam “Kau Datang Kepadaku Telanjang”, gejolak spiritual dalam “Sepasang Maut”, renungan mengenai eksistensialisme dalam “Setiap Orang Sendiri”, dan karya-karya Wan Anwar lainnya dalam bentuk gerak, tari, musik, audio dan visual.

Rata-rata kelompok teater dan kelompok film memasukkan unsur-unsur kekinian, yang satu sisi tidak ada dalam karya Wan Anwar dan menjadi persoalan berbeda di sisi yang lain. Dengan menangkap gambar kota Serang, pantai Anyer, restoran, diskotik yang kadung menjadi ikon masa kini untuk masuk ke dalam film, kelompok-kelompok film telah menyajikan teks-teks yang segar untuk mewakili teks-teks yang dimuat oleh Wan Anwar lebih dulu dalam tulisan. Begitu pun beberapa kelompok teater, mereka telah memuat teks-teks baru semacam lagu-lagu pop, *modern dance*, dan artistik yang tidak ‘kolot’.

Menilik hasil dari pementasan teater dan film yang ada pada Gelar Sastra secara keseluruhan, dunia kesenian Banten patut bernafas lega, setidaknya karena masih ada yang mencoba untuk terlibat dengannya. Tetapi, di sisi yang lain (inilah yang saya maksud dengan ‘di sisi yang lain’ sebelumnya), masuknya teks-teks masa kini dari Banten ke dalam karya-karya yang dipentaskan, lalu karya-karya itu masih bisa dipahami sebagai kegelisahan sendiri oleh para sutradara dan penyimak, ada sesuatu yang kiranya bermasalah.

Persoalan-persoalan yang dicatat oleh Wan Anwar dari masa-masa awal berdirinya Banten masih ada saat ini. Orang-orang cuma berganti, wajah tempat-tempat di Serang boleh berubah, tetapi persoalan kita masih sama. Sekiranya kondisi di luar karya seni telah berubah: kesejahteraan merata, korupsi hilang, dan semacamnya, karya-karya Wan Anwar, Rendra dan Thukul yang sudah dibicarakan sebelumnya tidak akan ‘semengena’ ini lagi. Kita cuma akan mencatatnya dan mengkajinya secara tekstual.

Tetapi, kita masih perlu menunggu.**[\*]**

1 Sumber: “Potret Pembangunan dalam Puisi” (1980).

2 Data Badan Pusat Statistik.

3 Baca indonesiarayanews.com 27 Desember 2013.

4 Baca tempo.co.id 27 Desember 2013.